



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TADULAKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAGAF
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN
3. NHK : 494616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 541.505.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/131 m2 di KOTA PALU ,
HASIL SENDIRI Rp. 384.500.000
2. Tanah Seluas 1902 m2 di PARIGI MOUTONG, WARISAN Rp.
23.775.000
3. Tanah Seluas 2085 m2 di PARIGI MOUTONG, WARISAN Rp.
26.062.500
4. Tanah Seluas 1833 m2 di PARIGI MOUTONG, WARISAN Rp.
22.912.500
5. Tanah Seluas 1768 m2 di DONGGALA, WARISAN Rp. 26.460.000
6. Tanah Seluas 1325 m2 di DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp.
20.295.000
7. Tanah Seluas 495 m2 di DONGGALA, WARISAN Rp. 15.000.000
8. Tanah Seluas 748 m2 di PARIGI MOUTONG, WARISAN Rp.
22.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 207.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V (TGN40-GKMNKD 10)
MINIBUS Tahun 2013, LAINNYA Rp. 112.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NEW MIO BLUE CORE CW (SE88 CW) Tahun
2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, YAMAHA BY8 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000
4. MOBIL, SUZUKI RW 415 FX-OVER 4X2MT Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	102.868.155
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	851.873.155
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	851.873.155

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.